

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*, Ed. Revisi, Djambatan, Jakarta.
- Mahmud, Peter Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grub, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Murad, Rusmadi, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Solikin, H. Nur, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Pasuruan.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2016, *Metodologi Penelitian Kombinasi Edisi 3*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2016, *Metodologi Penelitian Kombinasi Edisi 3*, Alfabeta, Bandung.
- Sumardjono, Maria S.W., 2019, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Suyitno, 2006, *Hak atas Tanah Kraton Kasultanan Yogyakarta*, Bulletin LMPDP Land PIU Bapenas Edisi 01, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 *jo.* Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembar Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembar Negara Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembar Negara Nomor 5339).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembar Negara Tahun 1997 Nomor 59).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembar Negara Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembar Negara Nomor 6630).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1369).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 246).

Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023).

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1).

Peraturan Gubernur DIY Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34).

Peraturan Gubernur DIY Nomor 49 Tahun 2018 tentang Prosedur Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 49).

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 *jo.* Peraturan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Surat Edaran Kasultanan Nomor 13/SE/VIII/2017 tentang Penataan, Pengawasan, dan Perlindungan Tanah-Tanah Kasultanan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Artikel Jurnal

Bahrayn, Al, Parakleyto Majma, "Penyelesaian Tanah Sultan Ground Dan Pakualaman Ground Yang dikuasai Masyarakat Berdasarkan Asas Kerakyatan," Aliansi Jurnal Hukum Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 2, No. 3, 2025.

Balqis, Nadia Ammara, *et. al.*, "Analisis Perbandingan Sistem Pendaftaran Tanah Indonesia dengan Negara Publikasi Positif", JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, Vol 2, No. 5, 2025.

Gautama, Tirta dan M. Shofwan Taufiq, "Sultan Ground: Dialektika Pluralisme Hukum Dalam Pengelolaan Hukum Pertanahan Nasional," Muhammadiyah Law Review, Vol. 8, No. 2, 2024.

Pansariang, Juosfiel Sadpri, "Proses Dan Syarat Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia," Lex Privatum Vol.2, No. 3, 2014.

Purba, Hasim, "*Reformasi Agraria dan Tanah untuk Rakyat: Sengketa Petani VS Perkebunan*", Jurnal Law Review, Vol. X, No. 2, 2010.

Ramadhanty, Diva Azmia dan Yunanto, "*Responsibility of Panitikismo in the Management and Utilization of Sultanate Land in Gunungkidul Regency*", Jurnal Daulat Hukum, Vol. 7, No. 1, 2024.

Rizaldi, Aldi, dan Endang Susilowati. "Dinamika Perkeretaapian Lintas Semarang-Juwana Tahun 1950-1998." *Historiografi* 1, no. 1 (2020).

Runtu, Geofanny MC, "Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata", *LEX ADMINISTRATUM* 12, no. 4 (2024).

Suhariono, Agus, *et. al.* "Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah (Kajian Sistem Publikasi Negatif Bertendensi Positif)." *Notaire* Vol. 5, No. 1, 2022.

Sukisno, Djoko, "Tanah Kasultanan Yogyakarta Dalam Hukum Adat" yang dimuat dalam *Mimbar Hukum Edisi Khusus 2007*", *Mimbar Hukum Edisi Khusus*, 2007.

Sumardjono, Maria S.W, "*Keistimewaan Yogyakarta di Bidang Pertanahan: Status Hukum Tanah Kraton Dalam Lingkup Hukum Tanah Nasional*", *Mimbar Hukum Edisi Khusus*, 2007.

Supama, Yohanes dan Antonius Imbiri, "Dualisme Pengaturan Hukum dalam Pengelolaan Tanah Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Tunas Agraria* Vol. 8, No. 3, 2025.

Supama, Yohanes dan Antonius Imbiri, "*Dualisme Pengaturan Hukum dalam Pengelolaan Tanah Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta,*" *Tunas Agraria*, Vol. 8, No. 3, 2025.

Wardojo, Waskito Widi. "Konflik Perebutan Lahan Kereta Api: Dilema Penguasaan Aset Negara Pasca Nasionalisasi." *Jurnal Sejarah Indonesia* 7, no. 1 (2024).

Wibawanti, Erna Sri *et al.*, "*Kepastian dan Perlindungan Hukum Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten oleh Masyarakat Pasca Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 31, No. 3, 2024.

Internet

DetikJogja, "Ini Poin Gugatan Keraton Jogja Rp1.000 ke PT KAI Soal Stasiun Tugu", <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7627369/ini-poin-gugatan-keraton-jogja-rp-1-000-ke-pt-kai-soal-lahan-stasiun-tugu>, diakses 25 Mei 2025.

Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jogja Kota, "Stasiun Tugu", https://kebudayaan.jogjakota.go.id/page/index/stasiun-tugu?utm_source=chatgpt.com, diakses 23 September 2025.

HaloJPN, "Sengketa Tanah", <https://halojpn.id/publik/d/permohonan/2025-6JGM#:~:text=Kasus%20sengketa%20tanah%20cenderung%20sering,mafia%20di%20dalam%20pendaftaran%20tanah>, diakses 11 Agustus 2025.

Jawa Pos Radar Jogja, <https://radarjogja.jawapos.com/jogja/655331779/turut-digugat-kasultanan-bpn-siap-beberkan-bukti-pt-kai-kantongi-alas-hak-atas-tanah-stasiun-tugu-jogja>, diakses 24 Mei 2025.

Kraton Jogja, "Keraton Yogyakarta Terbitkan Serat Kekancingan untuk PT. Kereta Api Indonesia (Persero)", <https://www.kratonjogja.id/peristiwa/1418->

[keraton-yogyakarta-terbitkan-serat-kekancingan-untuk-pt-kereta-api-indonesia-persero/](#), diakses 25 Agustus 2025.

Pangaribowo, Wisang Seto dan Sari Hardiyanto, “Keraton Yogyakarta Gugat Rp 1.000 ke PT KAI soal Lahan di Stasiun Tugu, Apa yang Diminta?”, <https://yogyakarta.kompas.com/read/2024/11/07/173844578/keraton-yogyakarta-gugat-rp-1000-ke-pt-kai-soal-lahan-di-stasiun-tugu-apa?page=all>, diakses 23 Mei 2025.

Yasin, Ahmad, “Stasiun Lempuyangan dan Stasiun Tugu, Mana Yang Tertua di Yogya?”, https://www.kompas.com/stori/read/2025/07/08/180000179/stasiun-lempuyangan-dan-stasiun-tugu-mana-yang-tertua-di-yogya-utm_source=chatgpt.com, diakses 23 September 2025.

Artikel, Majalah, atau Koran

Dimas, Rionald, "Publikasi Pendaftaran Tanah di Negara Indoneia Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum", Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanagara, 2021.

Konsorsium Pembaruan Agraria, “Dekade Krisis Agraria: Warisan Nawacita dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik 2024”, Catatan Akhir Tahun, 2023.

Sumardjono, Maria S.W., “Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Budaya”, Kompas, 2008, hlm. 112-113.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Dewa, Irfan Yoginawa Rifma, 2017, Politik Agraria di Daerah Istimewa: Konflik Hak Kepemilikan dan Penguasaan Tanah di Kabupaten Gunungkidul (Studi Kasus Sultan Ground di Pesisir Pantai Kabupaten Gunungkidul), Skripsi, Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Endriana, Eka Putri, 2024, *Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Atas Tanah Kasultanan di Kabupaten Sleman (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen)*, Skripsi, Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Kurniadi, Untung, 2021, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pada Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang (Studi Kasus Putusan pengadilan Negeri Serang Nomor 98/PDT.G/2018/PN SRG)*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

- Mua'di, Sholih, 2008, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Melalui Cara Nonlitigasi (Suatu Studi Litigasi dalam Situasi Transisional)*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Prajanto, Indradi, 2016, *Formulasi Bentuk Komparisi Akta Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Harta Bersama Untuk Menjaga Dan Memenuhi Ketentuan Asas Nemo Plus Juris Transfere Potest Quam Ipse Habel (Studi Di Kabupaten Sleman)*, Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Setiawati, Nur Aini, *Dari tanah Sultan menuju tanah rakyat: Pola pemilikan, penguasaan, dan sengketa tanah di Kota Yogyakarta setelah reorganisasi tanah 1917*, Sajogyo Institute.